

**PERSEPSI PEREMPUAN TERHADAP CALON LEGESLATIF
PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SEFANI
NIM. 180801004
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sefani
Nim : 180801004
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 09-09-2001
Alamat : Perumnas Jeulingke

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 18 Desember 2023
Yang Menyatakan



SEFANI
NIM. 180801004

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERSEPSI PEREMPUAN TERHADAP CALON LEGESLATIF
PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

SEFANI

NIM. 180801004

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

Pembimbing II



Aklima, M.A.
NIP. 198810062019032009

**PERSEPSI PEREMPUAN TERHADAP CALON LEGESLATIF
PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

(Studi Kasus Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Peserta Ujian Munaqasyarah Skripsi
Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Politik

Diajukan oleh:

Sefani
NIM. 180801004

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Desember 2023
5 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP:198401012015031003


Aklima, S.Fil.I., M.A.
NIP: 198810062019032009

Penguji I,

Penguji II,


Ramzi Murziqin, M.A.
NIP:198605132019031006


Arif Akbar, M.A.
NIP:199110242022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP:1974033271999031005

ABSTRAK

Budaya patriarki menjadi salah satu hambatan yang telah mempengaruhi pertarungan politik perempuan di Kota Banda Aceh sebagian masyarakat masih memandang perempuan sebelah mata bahkan untuk sesama perempuan saja belum tentu mendukung perempuan. Fokus penelitian peneliti di wilayah kecamatan Baiturahman dan Kuta Alam dikarenakan pada rekapitulasi daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 posisi pertama yang tertinggi pemilihan perempuan di kecamatan Baiturahman yaitu 11,039 dan kecamatan Kuta Alam yaitu 13,953. Metodologi yang peneliti pakai adalah metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini sangat berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Pendekatan kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2014 Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen hanya 3,33% dan tahun 2019 menjadi 13,33% tentunya dalam keterlibatan perempuan masih di bawah 30% oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemilihan perempuan terhadap calon legislatif perempuan di Kota Banda Aceh harapan pemilih perempuan terhadap calon legislatif pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil peneliti ada faktor yang mempengaruhi persepsi perempuan tidak memilih perempuan di karenakan si calon tidak memiliki hubungan sosial seperti merasa kurang mengenal latar belakang si calon adapun harapan yang diharapkan oleh pemilih perempuan untuk para perempuan anggota legislatif nantinya yang terpilih pada pemilihan umum 2024 yaitu perempuan merasa aman dan nyaman tanpa adanya kekerasan atau lebih kurang meminimalisir angka kekerasan pada perempuan jika nanti terpilih. Kesimpulannya bahwa sebagian pemilih perempuan beberapa masih berpendapat lebih baik dalam kepemimpinan untuk diandalkan adalah kaum laki-laki.

Kata Kunci: Perempuan, Persepsi, dan Masyarakat.

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan atas keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penug dengan ilmu pengetahuan. Adapaun skripsi ini yang berjudul “Persepsi Perempuan Terhadap Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Kota Banda Aceh).”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik di masa mendatang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih Kepada Allah SWT dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang tua tercinta dan keluarga besar yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material dan non material.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.

5. Rizkika Lhena Darwin M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik & sekretaris.
6. Eka Januar, M.Soc.Sc selaku pembimbing I dan Aklima, M.A selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi ini dengan baik
7. Terima kasih kepada orang-orang terkasih dalam hidup saya, khususnya papa dan mama telah menjadi orang tua terbaik di hidup saya yang penuh kasih telah mendoakan dan mendukung saya
8. Terima kasih kepada rekan-rekan Ilmu Politik 2018 terima kasih telah menjadi teman saya dengan penuh keseruan
9. Terima kasih kepada Nailis, Rafifah, Dara, Dimas, Hanif, Sarah Sundari, Sarah Amalia, Anggita Yolanda, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan ini tidak mengurangi rasa sayang saya kepada kalian yang telah banyak sekali membantu saya terutama do'a, semangat dan motivasi untuk skripsi ini
10. Kepada para informan yang telah membantu penelitian untuk mendapatkan informasi yang telah saya butuhkan
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Desember 2023
Penulis,

Sefani
NIM. 180801004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan.....	11
2.2. Landasan Teori.....	15
2.2.1. Teori Persepsi (<i>Perception</i>).....	15
2.2.2. Proses Terjadinya Persepsi	19
2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	20
2.3. Partisipasi Perempuan	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Fokus Penelitian	26

3.3. Lokasi Penelitian.....	27
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5. Informan Penelitian.....	28
3.6. Teknik Wawancara.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Dinamika Partisipasi Perempuan Pada Pemilihan Umum di Kota Banda Aceh.....	30
4.2. Persepsi Pemilih Perempuan Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2024.....	34
4.2.1. Pandangan Pemilih perempuan terhadap calon anggota legislatif perempuan di Kota Banda Aceh.....	34
4.2.2. Memilih karena Pendidikan dan Pengalaman.....	40
4.2.3. Perempuan Saling Mendukung Perempuan.....	43
4.3. Harapan Para Pemilih Perempuan Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2024.....	47
4.3.1. Memberi Jaminan Terhadap Perempuan.....	47
4.3.2. Pengenalan latar belakang calon anggota legislatif.....	50
4.3.3. Bertanggung Jawab Terhadap Kepemimpinan untuk Masyarakat.....	51
4.4. Analisis Peneliti.....	52
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA58
DOKUMENTASI63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Anggota Dewan Terpilih Dan Partai Serta Jumlah Suara Tahun 2014.....	6
Tabel 1.2 Nama-Nama Anggota Dewan Terpilih Dan Partai Serta Jumlah Suara Tahun 2019.....	6
Tabel 3.1 Narasumber	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia budaya patriarki masih berjalan meskipun sedikit demi sedikit terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin modern (modernisasi) banyak kaum perempuan yang telah berani menyuarakan pendapat dan partisipasi kaum perempuan ke publik, salah satu bentuk dari partisipasi dari kaum perempuan adalah keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam parlemen begitu penting karena parlemen adalah salah satu suprastruktur politik yang mempunyai peran penting dalam berbagai bidang kebijakan publik.¹ Pemerintah Indonesia telah memberikan ruang yang besar kepada perempuan agar memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk bergabung menjadi anggota legislatif, pemerintah menetapkan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.²

Kota Banda Aceh adalah ibukota Provinsi Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di wilayah Indonesia dalam sejarah Aceh telah mencatat bahwa perempuan Aceh secara Tangguh untuk dapat memimpin Negara, memimpin medan perang, terlibatnya dalam perundingan dan perdamaian serta gerakan sosial lainnya yang telah mampu mendobrak hegemoni

¹Satria Muchayar, Effendi Hasan. "Hak Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Perannya Dalam Alat Kelengkapan Dewan". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah Vol 3, no 3.

²Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak, Hendri Kurniawan. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba". Jurnal Administrasi Publik Vol 8, no 123.

kekuasaan dari kaum laki-laki dan mampu untuk bersinergi dengan organisasi yang dipimpin oleh para kaum laki-laki. Dalam konteks politik, para kaum perempuan Aceh masih harus untuk berjuang untuk mendapatkan haknya yang wajar supaya mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki. Karena ini faktor dari gender yang menjadi tolak ukur untuk kesempatan dan kemampuan yang sering terlihat untuk sebagian masyarakat masih meliaht dari faktor jenis kelamin.³

Kepentingan dan pandangan kaum laki-laki dan perempuan serta kelompok minoritas merupakan bagian yang mutlak dari suatu proses pengambilan keputusan, namun untuk keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah.⁴

Dalam pandangan mengenai budaya patriaki perempuan sebagian masih ada saja yang kurang percaya diri terhadap dunia politik, kehidupan perempuan yang sering sekali digambarkan sebagai posisi yang lebih rendah, sehingga dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri. Seperti inilah memperoleh legitimasi yang kuat dalam dunia politik, pada umumnya bisa dikatakan terlambat, sebab begitu banyak anggapan bahwa perempuan diidentik dengan sektor domestic sehingga sangat sedikit saat ini yang mau masuk ke dalam dunia politik.⁵

Kehadiran perempuan ke ruang publik secara lebih masif untuk dalam panggung politik secara structural dan diharapkan mampu untuk merumuskan

³ Cut Asmaul Husna, Jurnal *Public Policy*. "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pembangunan Aceh Pascakonflik", Vol 2, No 1 April 2016, hlm. 90

⁴ Nurcahyo. A (2016). Relevansi budaya patriaki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *jurnal Agastya*. Vol. 6 (I). Hlm: 25-27.

⁵ Nimrah S. & Sakaria (2015). Perempuan dan budaya patriaki dalam politik (studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislative 2014). *The Politics*. Vol. I. (2). Hlm: 173-182.

kebijakan-kebijakan negara yang dapat memperdayakan para perempuan-perempuan yang kurang mampu, menghapus kultur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap para perempuan yang mendapatkan kekerasan terhadap kaum perempuan dari berbagai macam kalangan.⁶

Namun untuk sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini telah sadar betapa pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kehidupan, tentunya ini berpengaruh terhadap masa depan para perempuan di Indonesia saat ini untuk partisipasi perempuan dalam politik dapat meningkatkan kesejahteraan semua kalangan terutama perempuan dengan mewakili, mengawal, mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan serta turut dalam suatu proses pembangunan termasuk merumuskan kebijakan.⁷

Adapun menurut dari Judit Squires ada tiga alasan mengapa kuota perempuan di parlemen menjadi sangat penting pertama kuota ini akan menciptakan adanya *women agency* yang tentunya dapat menjadi perpanjangan tangan perempuan dalam menyuarkan dan memperjuangkan regulasi yang sensitif gender pada hal pengambilan kebijakan, kedua untuk kuota perempuan akan memastikan adanya kebijakan adil terhadap gender untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *mainstreaming* gender di intergrasikan dalam tiap tahapan dalam pengambilan kebijakan, dan ketiga kuota perempuan dapat menyasar kepada peningkatan kuantitas jumlah perempuan di berbagai institusi pengambilan keputusan secara singkat sebagai tindakan khusus sementara (*affirmative action*).⁸

⁶ Rukmina G. Monoppo, *ibid.*, h. x

⁷ Sarifa Suhra “Potret Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia”, Vol XI Nomor 1 Januari 2018, hal: 335-336.

⁸ Squires, J., 1999, *Gender in Political Theory*, Cambridge: Polity Press

Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari penduduk Indonesia,⁹ ini merupakan suatu potensi yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini, kaum perempuan masih begitu tertinggal dengan kaum laki-laki di berbagai bidang kehidupan. Permasalahan seperti ini lahirlah aturan yang memberikan *affirmative* terhadap perempuan permasalahan atas keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang begitu penting dalam upaya meningkatkan peran politik perempuan. Sejak era reformasi telah diupayakan peraturan dari *Affirmation Action* dengan menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif. *Affirmation Action* adalah sebuah tanggapan atas realitas kondisi perempuan Indonesia yang masih kurang tertarik untuk bergabung ke dunia politik.

Perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama dalam politik maupun pemerintahan dalam *Affirmation Action* disahkan oleh beberapa Undang-undang diantaranya adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang yang lain juga mengatur *Affirmation Action* adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam Undang-undang tersebut jelas perempuan memiliki kuota khusus dalam ranah politik di Indonesia. Adanya *Affirmation Action* tentunya akan mempengaruhi pada proses rekrutmen dan pendidikan politik oleh partai politik

⁹ <https://www.bps.go.id>

bagi para calon anggota partai politik dan mendapatkan pendidikan politik di partai politik.¹⁰

Kebijakan *Affirmation Action* telah memberi kemudahan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara luas kepada mereka yang ingin bergabung ke partai politik dan untuk memberikan peluang munculnya para wakil-wakil perempuan di parlemen. Tentunya dari penilaian yang positif untuk keterwakilan politik perempuan harus diimbangkan oleh tanggung jawab moral, baik secara idealisme maupun implementasinya. Semua itu tergantung dari seberapa kuatnya idealisme dan konsistensi dari perjuangan kaum perempuan dalam panggung politik. Waktu ke waktu *Affirmative action* semakin di sempurnakan dalam bidang politik. Dapat dilihat dari progress Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu 2009, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika *Affirmative action* tidak diterapkan dalam suatu negara, maka akan terjadinya implikasi kepada kaum perempuan yang dinilai tidak akan mampu bergerak secara leluasa dalam menyumbangkan tenaga, kemampuan, dan ide pemikiran serta talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

¹⁰ Aziza Aulya, Andi Pangeran Moenta, Hamzah Halim, “Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan *Affirmation Action* dalam Sistem Kepartian”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol. 30 No. 2, hlm 127.

¹¹ Hasriani Hamid, “Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya *Affirmative Action*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hamid Vol. 3 No. 1 Desember 2019, hlm 27-28.

Pemilihan umum anggota DPR Kota Banda Aceh pada 2014 atas partisipasi perempuan dalam politik masih begitu rendah, dari jumlah anggota legislatif hanya 1 perempuan saja yang lolos dari jumlah 30 kursi yang telah disediakan sebesar 3,33% atau 30% yang harus sesuai dengan aturan Undang-undang. Berikut nama anggota legeslatif perempuan yang lolos pada pemilu 2014-2019:

Tabel 1.1
Nama Anggota Dewan Terpilih Dan Partai Serta Jumlah Suara Tahun 2014

Partai Politik	No. Urut	Nama Anggota Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
Partai Persatuan Pembangunan	5	Syarifah Munirah, S.Ag	845	1

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh 2014

Kuota 30% yang harus sesuai dengan Undang-undang tidak terpenuhi pada pemilu legslatif pada periode 2014-2019. Pada pemilu 2019 telah bertambah jumlah 4 anggota legeslatif perempuan yang lolos, berikut nama-nama anggota legislatif yang terpilih:

Tabel 1.2
Nama-Nama Anggota Dewan Terpilih Dan Partai Serta Jumlah Suara Tahun 2019.

Partai Politik	No Urut	Nama Anggota Terpilih	Suara Sah	Peringat Suara
Partai Keadilan Sejahtera	2	Devi Yunita, ST	1,545	1
Partai Persatuan Pembangunan	3	Syarifah Munirah, S.Ag	915	1
Partai Golongan Karya	6	Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM	495	1

Partai Keadilan Sejahtera	2	Tati Meutia Asmara, S.kH., M.Si	3.138	1
---------------------------	---	------------------------------------	-------	---

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh 2019

Dalam permasalahan ini tentu menjadi hal yang menarik untuk di teliti, namun hanya di ambil dari pemilih perempuan saja atau apa yang menjadi persepsi kaum perempuan di Kota Banda Aceh sebagiannya masih ada yang kurang mendukung sesama perempuan, apakah ini akan berlanjut pada pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2014 Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen hanya 3,33% dan tahun 2019 menjadi 13,33%,¹² keterlibatan perempuan masih di bawah 30% peneliti mengambil di Kota Banda Aceh karena Kota Banda Aceh merupakan salah satu Kota yang menjadi sorotan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya dan fokus penelitian peneliti di wilayah kecamatan Baiturahman dan Kuta Alam di karenakan pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada pemilu tahun 2019 posisi pertama yang tertinggi pemilih perempuan di kecamatan Baiturahman yaitu 11,039 dan selanjutnya kecamatan Kuta Alam yaitu 13,953.¹³

Budaya patriarki menjadi salah satu hambatan yang telah mempengaruhi pertarung politik perempuan di Kota Banda Aceh yang dimana sebagian masyarakat berpendapat dengan cara model berpikir Representasi Substantif, menilai isu perempuan juga dapat diperjuangkan oleh pihak laki-laki, bahkan

¹² <https://aceh.bps.go.id/indicator/40/376/1/persentase-keterlibatan-perempuan-dalam-parlemen-aceh.html>

¹³ Komisi Pemilihan Kota Banda Aceh (2 januari 2023)

sesama perempuan belum tentu mau untuk memajukan nasib sesama perempuan.¹⁴

Padahal kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan adalah membentuk bagaimana membangun paradigma supaya laki-laki dan perempuan dapat memiliki kesederajatan, sehingga tidak timbul rasa superioritas. Ada beberapa konteks yang dimaksud yaitu konteks sosial budaya karena yang menyebabkan perempuan berada di bawah laki-laki adalah karena adanya struktur sosial dan pusaran budaya yang kadang bisa membawa nilai dan pola tingkah laku yang tidak bagus untuk suatu proses perubahan sosial.

Memilih lokasi penelitian di kota Banda Aceh dikarenakan kota Banda Aceh adalah ibu kota dari provinsi Aceh dan juga sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Banda Aceh yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Penulis melakukan penelitian yang terkait dengan pandangan sesama perempuan terhadap calon legislatif dengan kata lain **“Persepsi Pemilih Perempuan Terhadap Caleg Perempuan Menjelang Pemilu 2024 di Kota Banda Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pemilih perempuan terhadap calon legeslatif perempuan di Kota Banda Aceh?

¹⁴ Aklima, Jurnal Pemerintahan dan Politik *“Menyoal Kualitas Caleg Perempuan Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aceh”*, Vol 7 No. 4 November 2022, hlm.

2. Bagaimana harapan pemilih perempuan terhadap calon legelatif perempuan menjelang pemilu 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu mengapa perempuan tidak memilih sesama perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang dapat dikontribusikan oleh penulis melalui penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini tentunya di harapkan dapat mengembangkan keilmuan di bidang ilmu politik, khususnya terkait pandangan pemilih perempuan untuk memilih calon legislatif perempuan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian untuk memberikan gambaran tentang Persepsi Pemilih Perempuan Terhadap Caleg Perempuan Menjelang Pemilu 2024 di Kota Banda Aceh.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang persepsi perempuan tentang caleg perempuan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi kepada masyarakat terkait persepsi pemilih perempuan terhadap caleg perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berbagi manfaat bagi pembaca untuk menjadi acuan penelitian skripsi kedepannya.
- c. Serterusnya juga diharapkan bisa menjadi bahan perhatian dan masukan bagi pihak-pihak tertentu untuk lebih memahami tentang persepsi perempuan terhadap caleg perempuan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian sebelumnya Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah adalah sebuah penelitian yang membahas mengenai Kekalahan Calon Legislatif Perempuan dari Partai Aceh pada Pemilu Legislatif Di kota Banda Aceh Tahun 2014. Pada penelitian tersebut mengupas tentang faktor apa saja yang membuat para calon legislatif perempuan pada Partai Aceh kalah pada pemilu legislatif di Kota Banda Aceh tahun 2014 dan dalam jurnal penelitian tersebut juga meneliti bagaimanakah bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh para calon legislatif perempuan dari Partai Aceh pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian tersebut adalah kekalahan para calon legislatif Perempuan mempunyai faktor yaitu kurangnya kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat terhadap para calon legislatif perempuan, kurangnya perhatian partai terhadap para calon legislatif perempuan dan kurang dikenalnya calon legislatif perempuan tersebut dimasyarakat dan kurangnya perhatian partai.¹⁵

Jurnal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya jurnal tersebut berjudul Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kecamatan Parenggean. Penelitian tersebut menjelaskan pada persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam

¹⁵ Muh. Ikramullah Husaini Ibrahim, MA, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah "Kekalahan Calon Legislatif Perempuan dari Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014." Vol 2, Nomor 3:1-19 Agustus 2017.

keanggotaan legislatif di lingkungan I Kelurahan di Kecamatan Parenggean. Ada banyak hasil yang di buktikan dari penelitian tersebut antaranya adalah bahwa persepsi dari masyarakat terhadap calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu masih adanya keraguan-raguan terhadap kemampuan untuk menjadi wakil rakyat di DPRD nantinya, kurangnya sosialisasi dari para calon legislatif perempuan ke masyarakat sehingga menimbulkan persepsi masyarakat kurang menimbulkan pengaruh dan kurang dikenal oleh calon yang memilih dan masih banyaknya anggota legislatif laki-laki yang mendominasi dalam berperan di ranah kepemimpinan politik.¹⁶

Jurnal dari program Studi Politik Indonesia Indonesia Terapan yang berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2019-2024 di Provinsi Lampung. Dalam jurnal tersebut di teliti bahwa kurangnya dukungan terhadap kaum perempuan menjadi kendala besar sehingga belum terpenuhinya kuota sebesar 30% atas keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah. Minimnya dukungan tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja para perempuan di lembaga-lembaga politik, khususnya dalam upaya merekrut kader politik perempuan.¹⁷

Skripsi dari program Studi Ilmu Politik dengan judul Pengaruh Interpretasi Terhadap Preferensi Keterpilihan Caleg Perempuan di DPRK Kota Sabang penelitian ini ditulis oleh Rafifah Munifah. Dalam penelitian ini membahas menurut

¹⁶ Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak, Hendri Kurniawan, Jurnal Administrasi Publik “Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba”. Vol 8, Nomor 1, April 2022.

¹⁷ Vrenanda Bella Yozevi, Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2014-2019 di Provinsi Lampung”,

peneliti hal yang menarik untuk diteliti di Sabang karena Sabang memiliki kondisi sosial budaya yang unik dalam kalangan masyarakat sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di parlemen dan juga penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui makna dari relasi gender bagi masyarakat Kota Sabang itu sendiri, selanjutnya mencari faktor-faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat.¹⁸

Jurnal dari program Studi Ilmu Politik dengan judul *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia* penelitian ini ditulis oleh Dirga Ardiansa dari Universitas Indonesia dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa hal yang diteliti oleh peneliti, yaitu representasi politik tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, namun hanya separuh atau sebagian sehingga ini adalah tentang klaim semata bukan hanya sebuah fakta representasi. Selanjutnya, representasi politik yang demokratis terjadi jika mereka yang mempunyai kepentingan dipengaruhi atau tersentuh oleh pembuatan keputusan tersebut. Terakhir, representasi politik dapat dihasilkan dari suatu proses electoral (pemilu) dan non-electoral.¹⁹

Jurnal dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan oleh Achmad Soeharto dengan judul *Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan dalam* penelitian ini membahas kurangnya pendidikan politik yang mana hak politik pada perempuan harus diutamakan, pendidikan pada perempuan harus mempunyai arah yang jelas untuk menuju kepada kemampuan kaum perempuan yang memiliki

¹⁸ Rafifah Munifah, Skripsi Mahasiswa Ilmu Politik *“Pengaruh Interpretasi Terhadap Preferensi Keterpilihan Caleg Perempuan Di DPRK Kota Sabang”*

¹⁹ Dirga Ardiansa, jurnal politik *“Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia”*. Vol. 2; Iss 1, Article 2.

kekuatan kesadaran pentingnya pembebasan kepada kaum perempuan dan perempuan dapat memiliki jati diri dan kekuatan dalam dunia politik.²⁰

Jurnal penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang di tulis oleh Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul *Modal Caleg Perempuan dan Politik Partai dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. Penelitian ini membahas tentang tingkat keterwakilan perempuan dalam berpolitik di Indonesia yang tidak terlepas dari beragam faktor, salah satunya modal yang dimilikinya. Penelitian ini juga menjelaskan modal yang dimiliki oleh caleg perempuan di tengah-tengah politik partai dalam pemilu dan juga penelitian ini berfokus pada analisis pada kasus Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Keterwakilan perempuan untuk sebagai anggota DPRD di Kabupaten ini merupakan tertinggi dibandingkan oleh kabupaten yang lain di wilayah Yogyakarta, yaitu sebanyak 13 kursi (26%) dari total 50 kursi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa perolehan kursi perempuan terus meningkat, namun peningkatannya tidak signifikan karena modal dari caleg perempuan dikendalikan oleh politik partai melalui medan pemilu.²¹ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah adanya perbedaan lokasi penelitian, perbedaan *respondent* dan perbedaan hasil yang di dapatkan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

²⁰ Achmad Soeharto, "Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan". Vol. 3, No. 1, Juli 2011

²¹ Dessy Ramdhani, Dian Eka Rahmawati. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik "Modal Caleg Perempuan dan Politik Partai dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman". Vol 10, No. 1 : 39-62.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Persepsi (*Perception*)

Secara etimologi menurut dalam bahasa Inggris yang asal katanya adalah *perception* yang berarti pandangan, tanggapan *perceptive* daya melihat. Definisi persepsi adalah suatu proses dengan mana para individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka supaya memberikan makna bagi lingkungan tempat mereka tinggal.²²

Persepsi merupakan salah satu faktor psikologis yang berperan dalam pembentukan perilaku seseorang. Bersama dengan adanya persepsi terhadap suatu objek, peristiwa atau benda, tentunya akan lahir tindakan yang akan diambil oleh seseorang yang mempersepsikannya. Robbins mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.²³ Persepsi termasuk faktor psikologis yang tentunya sangat mempengaruhi seseorang. Dalam ilmu psikologis dan kognitif persepsi adalah suatu proses untuk memperoleh, menginterpretasi, menyeleksi dan mengorganisasi informasi dan metode studi. Persepsi dapat dengan pendekatan biologi ataupun psikologi untuk menggambarkan pemikiran dari mental seseorang.²⁴

²² Robbin, P. Stephen, 1996, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih bahasa Jusuf Udaya, Edisi 3, Jakarta: Arcan.

²³ Robbins, S, P. 2003. "*Peilaku Organisasi (Jilid I)*. Edisi Alih Organisasi Bahasa. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramdia.

²⁴ Muhammad Bawono, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, "*Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*".

Persepsi mempengaruhi kemauan pada akhirnya kemampuan tersebut melakukan dapat sesuatu, menurut Asngari bahwa kemauan adalah bagian yang penting dari kinerja seseorang,²⁵ persepsi mencakup penerimaan stimulus (*inputs*), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap seseorang, sehingga dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.²⁶ Menurut pendapat Thoha bahwa persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi selalu berkaitan dengan pengalaman dan tujuan seseorang pada waktu terjadinya proses persepsi.²⁷ Melalui persepsi orang dapat mengenali dunia sekitarnya, yaitu dunia yang terdiri atas benda, manusia dan segala macam kejadian-kejadian. Kejadian tersebut dapat berupa sistem budaya, norma-norma masyarakat atau berbagai kenyataan sosial. Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang lain termasuk disebut sebagai faktor personal. Persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, namun karakteristik orang-orang yang memberi respon terhadap stimuli.²⁸

²⁵ Asngari, PS. 1984. "*Persepsi Direktur Penyeluhan Pertanian Tingkat Karesidenan dan Kepala Penyuluh Pertanian Terhadap Peranan dan Fungsi Lembaga Penyeluh Pertanian di Negara Bagian Texas Amerika Serikat*". Bogor : Media Peternakan. Vol. 9 No. 2 Fakultas Pertenakan IPB.

²⁶ Gibson. James. 1986. "*Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses*". (Edisi Terjemahan Oleh Djoerban Wahid). Jakarta : Erlangga.

²⁷ Thoha, M. 2005. "*Perilaku Oraganisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

²⁸ Rahmat Jalaluddin. 1998 "*Psikologi Komunikasi*". Bandung : PT Rosdakarya.

Bimo Walgito mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai salah satu kesatuan dengan berbagai pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus.²⁹ Sedangkan Irwanto mengatakan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsa (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai kepada rangsang itu disadari dan dimengerti.³⁰

Proses terjadinya persepsi ada melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Adapun proses fisik berupa obyek menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Untuk proses berupa stimulus yang telah diterima oleh indera yang diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses yang terjadi di dalam otak sehingga menyadari stimulus yang diterima.³¹

Disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh panca inderanya dan stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang pada akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang telah terjadi. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan atau dalam ranah situasi dimana persepsi

²⁹ Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum" Yogyakarta: Andi Offset, 2004

³⁰ Irwanto, "Psikologi Umum", Jakarta: PT Prenhallindo, 2002, hlm 71.

³¹ <http://www.kpu.go.id/persepsi-masy-Ende-pd-parpol-perilaku-memilih-KPU-Kabupaten-Ende>, diakses pada 22 Juli 2023

tersebut dibuat. Gifford dalam Ariyanti, juga menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. *Personal Effect*

Dalam definisi ini menjelaskan bahwa karakteristik dari individu yang akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal ini, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.

Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi dan pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan sudah secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan oleh pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan telah mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

2. *Cultural Effect*

Gifford memandang bahwa konteks dari kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tempat tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang dalam melihat dunia. Selain itu pandangan dari Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

3. *Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan tentunya akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang telah menghasilkan karakter atau tipikal tertentu dan telah menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh suatu individu dan juga dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, persepsi yang terbentuk masing-masing itu dapat berbeda-beda.³²

Teori ini berfokus kepada hubungan antara lingkungan fisik dan perilaku manusia dan menurut Gifford, lingkungan fisik memiliki pengaruh yang besar dan langsung terhadap emosi, sikap dan perilaku individu.³³

2.2.2. **Proses Terjadinya Persepsi**

Untuk proses terjadinya persepsi ada 3 tahapan, yaitu ada proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa obyek yang menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Untuk proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh indera yang diteruskan oleh

³² Siti Fatimah HSB, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, “*Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal*. Padangsidimpuan 2021 hal.18.

³³ Robert Gifford (2014) *Environmental Psychology: Principles and Practice*

saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses yang masuk ke dalam otak sehingga individu akan menyadari stimulus yang diterima.³⁴

House dan Kerr berpendapat ada tiga komponen yang paling utama dalam proses persepsi, yaitu :

1. Seksi (*screening*), yaitu proses psikologis yang erat hubungannya dengan pengamatan kepada stimulasi yang diterima dari luar
2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti kepada seseorang
3. Interpretasi dari persepsi itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sondang P. Siagian, mengemukakan ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat :

1. Diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.
2. Sasaran persepsi, sasaran itu berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.

³⁴[http://www.kpu.go.id/Persepsi_Masy_Ende_pd_Parpol_Perilaku_Memilih_\(KPU_Kabupaten_Ende\)](http://www.kpu.go.id/Persepsi_Masy_Ende_pd_Parpol_Perilaku_Memilih_(KPU_Kabupaten_Ende)) diakses pada 25 Juli 2023 Pukul 19:44

3. Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi adalah faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.

Demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang terhadap sesuatu tidak akan muncul begitu saja dengan sendirinya, tapi ada hal yang tentunya mempengaruhi, oleh karena itu persepsi yang dimiliki seseorang berbeda dengan seseorang lainnya, walaupun kepada objek yang sama.³⁵

2.3. Partisipasi Perempuan

Definisi dari partisipasi politik adalah keterlibatan yang aktif antara individu maupun kelompok pada proses pemerintahan yang berdampak kepada kehidupan mereka. Hal ini tentunya meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi yang sangat penting dari partisipasi politik adalah proses aktif seseorang yang mungkin menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan, namun tidak memainkan peran aktif termasuk partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah partai politik atau berkontribusi dalam menajamen koperasi politik atau koperasi perumahan masyarakat, maupun tindakan inkonvensional.³⁶

Partisipasi politik perempuan, sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian pada kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik.³⁷

Partisipasi perempuan adalah berbicara tentang bagaimana perempuan mengakses

³⁵ Siagian, Sondang P., 1989, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Bina Aksara.

³⁶ Faulks Keith (2010). *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung: Nusa Media.

³⁷ Susanti (2015). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013* (Studi Kasus di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Jom FISIP. Vol. 2. (2). Hlm: 1-18.

ranah politik. Berpendapat tentang bagaimana perempuan merebut kursi dalam ranah parlemen yang masih sangat dikuasai oleh budaya patriarki dan bahkan ranah politik masih saja dipandang sebagai ranah maskulin yang patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran-peran substantif perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan.³⁸

Keterwakilan Perempuan begitu sangat penting karena ada berbagai alasan sebagai berikut menurut Thalib.³⁹

1. Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki
2. Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris tradisional
3. Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut
4. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial
5. Kurangnya *political will* pemerintahan
6. Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dan juga Undang-Undang memberikan jaminan kepada warga negaranya dalam persamaan hak dan kewajiban di bidang politik dan lainnya. Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan yang sukarela bagi kaum perempuan yang bergabung kepada komunitas

³⁸ Dedees Adek R. (2016). *Merebut Kursi Impian Partisipasi Perempuan di Tengah Intervensi Negara dan Dinasti Politik*. Vol. 22 (2). Hlm: 32-322.

³⁹ Thalib, Nur A. (2014). *Hak Politik Perempuan Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materi Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008)*. Cita Hukum, Vol. 2 (No. 2), pp. 234-248.

kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lainnya. Dalam hal ini kaukus mereka dapat mengambil bagian kepada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Untuk secara umum, partisipasi tidak hanya kepada bidang politik, akan tetapi bisa ke segala bidang kehidupan karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga sangat dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan ini segenap perempuan dalam segala ruang lingkup, terlebih pada ruang lingkup politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan.⁴⁰

Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif masih sangat rendah dapat dilihat dengan populasi yang dimana perempuan sangat cenderung lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, rendahnya partisipasi tentunya ini mempunyai penyebabnya, yaitu disebabkan oleh psikologis, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, juga yang terpilih ini tidak memiliki kompeten untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kebijakan.⁴¹

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik telah ditentukan oleh pertama dari partai politik yang kurang memberikan kesempatan untuk para perempuan untuk bergabung, dan kurangnya mendapatkan kepercayaan terhadap perempuan dalam menempatkan diri dalam forum-forum tertentu. Kedua, adanya

⁴⁰ Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6 (No. 1), pp.1-27

⁴¹ Oktaviani A.S. (2011). Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal. *Pluralitas Agama Dalam Keluarga Jawa*, 3(1), 92-102. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938>

budaya patriaki yang telah menjadi budaya untuk menghambat peran perempuan dalam politik praktis, dan perempuan juga dinomorduakan dalam pengambilan keputusan. Ada banyak sekali perempuan yang tidak ikut serta dalam politik karena alasan budaya patriaki yang sangat kental. Adapun menurut pendapat Bhalota, target 30 persen kandidat perempuan tidaklah mudah untuk diwujudkan oleh partai politik karena partai politik masih sangat sulit untuk menerapkan kebijakan tersebut, penyebab selanjutnya adalah karena jumlah perempuan dari partai politik masih terbatas jumlahnya. Budaya patriaki masih saja menjadi penghalang untuk gerakan para perempuan yang ingin bergabung keranah legislatif. Ketiga, keturunan tokoh politik yang hanya bisa tertarik ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Dapat menjanjikan karena garis keturunan yang telah mempunyai basis massa atau pemahaman seperti apa rintangan yang ada di dalam politik.⁴²

Kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan adalah bagaimana untuk bisa membangun paradigma supaya laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan atau kesederajatan, sehingga tidak adanya rasa superioritas. Ada beberapa konteks yang dimaksud adalah konteks sosial budaya karena yang menyebabkan perempuan berada di bawah laki-laki adalah karena adanya struktur sosial dan pusran budaya yang membawa nilai dan pola tingkah laku yang tidak bagus pada proses perubahan sosial. Patriaki adalah sistem yang dimana perempuan dijadikan tidak terlihat dan kurang berpengaruh. Laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum, bahasa, adat-istiadat, etiket, pendidikan, dan pembagian kerja

⁴² Angin, R., Yuswadi H., Patriadi, H. B., & Dyah Gianawati, N. (2018). *The Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 33. <https://doi.org/10.26618/ojip.v8i960>

menentukan peran yang seharusnya bagi perempuan, dan dimana perempuan berada di bawah posisi laki-laki.⁴³



⁴³ Efianingrum, Ariefa, 2008. Pendidikan dan Pemajuan Perempuan: *Menuju Keadilan Gender*. Jurnal Fondasia.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya yang tidak dapat diukur dengan angka. Pendekatan kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia⁴⁴

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis akan mengkaji pandangan seluruh kalangan sosial perempuan pandangan sesama perempuan terhadap caleg perempuan pada pemilu di tahun 2024, mengidentifikasi prioritas penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, membangun fokus penelitian berarti dengan memiliki fokus adalah kepada pengaturan kriteria penahan-penahan secara efektif untuk menangkap informasi yang masuk.

Menetapkan fokus penelitian yang tepat untuk mencegah pengumpulan data yang tidak relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Dalam hal ini, fokus

⁴⁴ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal 286.

penelitian akan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan sifatnya yang masih bersifat sementara, sejalan dengan berkembang masalah yang teridentifikasi oleh penulis pada lokasi penelitian.

Menentukan fokus penelitian untuk membatasi peneliti supaya tidak terjebak pada hal-hal yang sangat umum dan tidak terlalu relevan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Persepsi Pemilih Perempuan Terhadap Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2024

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi bertujuan untuk membatasi dan memperkecil ruang penelitian untuk dapat mengupas dan membahas secara tajam dan fokus serta agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumus masalah. Lokasi dari penelitian ini adalah di Kecamatan Baiturahman dan Kuta Alam. Penulis mengambil dan memilih kedua kecamatan tersebut karena ingin mengetahui pandangan dari sesama perempuan terhadap para calon legislatif.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan penulis gunakan adalah data primer dari hasil wawancara, data primer yang penulis dapatkan dari berbagai jurnal dan buku..Menurut Bungin, Data Primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁵

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

3.5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para pemilih perempuan pada dua kecamatan di Kota Banda Aceh, kecamatan Baiturahman dan Kuta Alam Berikut

Tabel Nama-nama dan Pekerjaan Para Narasumber:

Tabel 3.1
Narasumber

No	Nama	Pekerjaan	Kecamatan
1	Ibu July	Pedagang Sayur	Baiturahman
2	Ibu Susan	Pedagang Makanan	Baiturahman
3	Ibu Sri	Ibu Rumah Tangga	Baiturahman
4	Ibu Suhelmi	Ibu Rumah Tangga	Baiturahman
5	Ibu Ely	Ibu Rumah Tangga	Kuta Alam
6	Rina	Mahasiswa	Kuta Alam
7	Ibu Intan	Pedagang Gorengan	Kuta Alam
8	Ibu Nasriah	Pedagang Baju	Baiturahman
9	Ibu Mariani	Guru SMA	Baiturahman
10	Ibu Herlina	Pedagang Makanan	Baiturahman
11	Ibu Novita	Pedagang Makanan	Kuta Alam
12	Ibu Umi Kalsum	Pedagang Makanan	Kuta Alam
13	Ibu Khalida	Pedagang Minuman	Baiturahman
14	Ibu Salwa	Pedagang Makanan	Kuta Alam
15	Ibu Nong	Pedagang Makanan	Kuta Alam
16	Ibu Tia Andalusia	Wartawan	Kuta Alam

3.6. Teknik Wawancara

1. Wawancara Terbuka (*Open interview*)

Yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam memberikan jawaban.⁴⁶

2. Observasi (*observation*)

Metode dari obeservasi adalah teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Obeservasi berbeda dengan interviu, cakupan obeservasi lebih luas dibanding dengan intervi, observasi tidak terbatas hanya apada manusia saja, benda-benda yang sekecil apapun dalam bentuk apapun dapat diamati melalui observasi langsung ke lapangan.⁴⁷

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi dengan teknik ini dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari berbagai dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir.⁴⁸

⁴⁶ Nina Siti Salmaniah Siregar, Karya Ilmiah “*Metode dan Teknik Wawancara*” Universitas Medan Area (Medan: 2002), hlm 20.

⁴⁷ Prof. Dr. Diam’an Satori, M.A., Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd., (Alfabet: Bandung 2009), hlm.129.

⁴⁸ Ibid 186

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dinamika Partisipasi Perempuan Pada Pemilihan Umum di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah ibukota dari Provinsi Aceh yang sangat peka terhadap angka yang masih tinggi yaitu Golongan putih (Golput), hal ini masih dapat dilihat dengan masih banyaknya warga yang tidak menggunakan hak suaranya di pemilihan umum 2014 dan 2019. Untuk tidak memilih memang tidak ada yang namanya sanksi atau hukuman apapun namun untuk golput bukanlah solusinya. Pada penelitian sebelumnya mengatakan tingkat golput di kota Banda Aceh pada tahun 2014 serta 2019 berada di 699.830 orang atau 22,42 persen warga yang sejatinya terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) mereka tidak menggunakan hak pilihnya atau menjadi golongan putih (Golput) pada Pemilihan Umum Legislatif 09 April 2014. Namun pada pemilihan umum pada tahun 2019 di Kota Banda Aceh untuk tingkat partisipasi mencapai jauh lebih meningkat mencapai 76,76% atau lebih tinggi dari target nasional. Tingkat partisipasi yang terlihat, juga berbeda jauh pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dengan angka hanya mencapai 63,9% dengan tingginya angka golongan putih di Kota Banda Aceh.⁴⁹

Eep Saefulloh Fatah, mengklafikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis yang mana karena mempunyai sebab ketika tidak memilih

⁴⁹ Razimi, Ubaidullah Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah “*Sosialisasi Politik Partai Nanggro Aceh Kota Banda Aceh Untuk Menekan Angka Golput 2019*” Vol 4, No 4: Agustus 2019 hlm. 1

(seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lainnya) untuk berlangan hadir ketempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru ketika mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, kedua golput teknis politis seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya ataupun pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu), ketiga golput politisi yaitu yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa kepada perubahan dan kepada perbaikan, dan keempat golput ideologis yaitu mereka yang tidak percaya kepada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat ke dalamnya, seperti alasan fundamentalisme agama atau alasan politik ideologi lainnya.⁵⁰

Dalam penelitian sebelumnya adapun hambatan pemenuhan hak-hak politik perempuan di kursi legislatif tidak hanya terjadi di tingkat nasional tapi juga terjadi di tingkat daerah keterlibatan ini masih saja di bawah 30% yang mana keterlibatan perempuan dari tahun 2014-2019 (17,32%) dan 2019-2024 (20,8%).⁵¹ Pada pemilihan umum 2014 hanya ada 1 kursi saja di tingkat DPRK yaitu Syarifah Munirah, S.Ag dari Partai Persatuan Pembangunan dengan suara sah 845 dan pada pemilihan umum tahun 2019 naik menjadi 4 kursi yaitu: Pertama, Devi Yunita, ST dari Partai Keadilan Sejahtera dengan suara sah 1,545 Kedua, Syarifah Munirah, S.Ag dari Partai Persatuan Pembangunan dengan suara sah 915 Ketiga, Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM dari Partai Golongan Karya dengan suara sah 495 Keempat,

⁵⁰ Eep Saefulloh Fatah dalam Hery M.N. Fathah, *Fenomena Golput dan Krisis Kepercayaan*

⁵¹ Aklima, Jurnal Pemerintahan dan Politik “Menyoal Kualitas Caleg Perempuan Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aceh” . Vol 7 No. 4 November 2022, hlm. 8

Tati Mutia Asmara S.kH., M.Si dari Partai Keadilan Sejahtera dengan suara sah 3.138.

Penelitian sebelumnya di tahun 2014 membahas tentang kekalahan 12 dari partai lokal yaitu Partai Aceh calon anggota legislatif perempuan tingkat Kota Banda Aceh para calon anggota tersebut tidak terpilih karena begitu masih begitu tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif laki-laki adapun faktor selanjutnya kurang dikenalnya calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri di masyarakat dan kurangnya perhatian partai terhadap calon legislatif perempuan.

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Partai Politik ialah organisasi yang bersifat nasional yang di bentuk sekelompok warga negara dengan sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pemilihan umum adalah tempat pertarungan atau arena di antara para aktif dalam sistem demokrasi. Karena menjadi sebuah pertarungan, tentunya akan terjadinya kekalahan dan memenangkan pertarungan dan keduanya adalah hal yang wajar terjadi dan tentunya termasuk dalam Pemilu Umum Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai politik sering sekali cenderung mempunyai pandangan untuk potensi perempuan dalam ranah politik sebelah mata dan beranggapan bahwa perempuan tidak dapat hak untuk berpolitik dengan baik. Maknanya adalah hak perempuan dalam politik hanya sekedar “alat dalam sistem politik” oleh sebab itu di sebagian partai politik yang telah mendaftarkan atau mencalonkan perempuan untuk sebagai

calon legislatif hanya untuk sekedar memenuhi syarat kelengkapan yang mana telah ditetapkan oleh Undang-Undang saja. Padahal perempuan dan politik itu mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia politik, seiring dengan perkembangan kesadaran perempuan tentang persamaan hak. Pentingnya representasi perempuan di ranah politik, figur perempuan sangat perlu untuk dikedepankan dalam posisi pengambilan keputusan. Sehingga keputusan tersebut yang dihasilkan juga dapat mengakomodir kepentingan perempuan dan sebagai representasi perempuan untuk mengurangi problem yang dialami perempuan dengan artian, perjuangan kepentingan perempuan tentunya harus dilakukan oleh sesama perempuan. Dalam perjuangan ini, maka sangat diperlukan kesadaran dari perempuan untuk sebagai interpretasi dari dalam diri perempuan untuk memasuki dunia perpolitikan.⁵²

Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas perempuan atau rendahnya sumber daya perempuan, sebagai berikut:

Faktor internal perempuan, ini menunjukkan dengan masih rendahnya atau terbatasnya motivasi perempuan supaya meningkatkan dirinya supaya maju, sikap menerima dan pasrah terhadap suatu keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Masalah selanjutnya yang dihadapi perempuan adalah gerak perempuan juga terkendala atas pendidikan dan pengetahuan. Terbatasnya wawasan mereka, rendahnya keterampilan sebagai perempuan terhadap berbagai bidang, juga rendahnya angka kesehatan wanita.

⁵² Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Adapun faktor kedua eksternal perempuan, faktor ini dipengaruhi oleh faktor yang menyangkut kepada nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemah ajaran agama, antara hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender. Nilai-nilai budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan terdiskriminasi dalam berbagai hal kehidupan. Perempuan itu masih saja ada yang beranggapan warga negara kelas dua. Permasalahan-permasalahan inilah yang telah mempengaruhi cara perempuan mengembangkan konsep diri yang telah menghambat diri mereka untuk maju.

4.2. Persepsi Pemilih Perempuan Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2024

4.2.1. Pandangan Pemilih perempuan terhadap calon anggota legislatif perempuan di Kota Banda Aceh

Dalam kepemimpinan yang baik mau itu di pimpin oleh laki-laki maupun perempuan tentunya telah mempunyai tujuan yang sama hanya saja ciri fisiknya saja yang berbeda, kepemimpinan adalah suatu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup untuk mendorong atau mampu untuk megajak orang-orang untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang teapt bagi situasi khusus.⁵³

Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan untuk sebagian bahwa perempuan harus berfokus kepada peran domestik dan reproduksi

⁵³ Kartono, Kartini, 2009, *Pemimpin dan /kepemimpinan*, Jawa Barat: Raa Grafindo Persada.

yang mana pemahaman seperti inilah yang menghambat kemajuan para perempuan pada bidang politik selain itu juga di pengaruhi oleh ilmu pengetahuan agama.

Permasalahan ini peneliti mendapatkan data di lapangan dari seorang Ibu yang bekerja sebagai pedagang sayur yang bernama Ibu July di Kawasan Pasar Stui dan tinggal di seputaran Pasar tersebut di Kecamatan Baiturahman, beliau memaparkan bahwa,

“Saya memilihnya laki-laki mau bagaimanapun perempuan harus menjadi makmum tidak boleh menjadi seorang imam dalam hukum perempuan tidak boleh menjadi imam. Kecuali imam kita perempuan makmumnya perempuan. Selagi masih ada laki-laki yang mampu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin”.⁵⁴

Dapat di jelaskan bahwa untuk menaruh kepercayaan sesama perempuan saja masih sulit hal ini di pengaruhi oleh stereotip perempuan dalam ilmu psikologi yang mana perempuan itu pasif, emosional, penurut, dan penyangg. Tentunya inilah yang membentuk faktor-faktor domestik perempuan dan dianggap *nature*-nya perempuan,⁵⁵ selain itu juga di pengaruhi oleh budaya patriarki yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentunya ini telah mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat.⁵⁶ Menurut Durkheim dalam Abbas, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan oleh orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan. Internaliasasi sedemikian rupa menurut Djajnergara

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu July (3 Mei 2023).

⁵⁵ Ida Novianti Jurnal studi & Anak “*Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*” hlm.2.

⁵⁶ Ruddy Firman S, Sri Wahyuni, Rahma Syafitri, Jurnal Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji “*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang*. Vol. 4, No. 2, September 2022, hlm. 3.

melahirkan pelabelan atau stereotipe bahwa laki-laki adalah sosok yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi keluar, penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah yang mempunyai kepribadian yang tergantung, pasif, lembut, nonagresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri.⁵⁷

Stereotip terhadap perempuan dalam politik yang didasarkan kepada budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat menjadi hambatan bagi perempuan dalam bidang ini. Stereotipe ini seringkali berujung kepada asumsi bahwa politik bukanlah dunia perempuan karena politik sendiri.

Politik harus melibatkan semua kalangan termasuk perempuan, namun ada persoalan dalam masalah posisi dan peran yaitu gender laki-laki dan perempuan karena begitu pentingnya peran perempuan dalam dunia politik dan tentunya perempuan juga memiliki andil dalam menentukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik. Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan Konstitusi Negara sudah memberikan ruang bagi setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, walaupun demikian profil perempuan Indonesia untuk saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam dilemma karena ada faktor dari persepsi yang sangat melekat kepada perempuan yaitu peran perempuan adalah sebagai wilayah kedua setelah laki-laki.⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Raja Grafindo Persada.

⁵⁸ Nimrah, Siti., & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics*, Vol. 1 (No. 2), pp. 173-182.

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi perempuan untuk memilih perempuan, para pemilih selain melihat dari segi visi dan misi caleg tersebut ada juga yang melihat dari faktor sosiologis yang meliputi dari pendekatan sosiologis. Seperti paparan dari Ibu Susan warga kampung Peuniti, Kecamatan Baiturahman yang mengatakan bahwa,

“Disini ada salah satu perempuan beliau warga asli sini yang mencalonkan diri untuk naik ke DPRK, namun masyarakat tidak memilih karena kedekatan dan hubungan sosial sedikit kurang terhadap masyarakat dan masyarakatpun kurang mengenal sosok beliau.”⁵⁹

Dapat di jelaskan bahwa ini selain dari faktor sosiologis adapaun faktor perilaku pemilih *voting behavior* ini merupakan sifat alamiah manusia yang bisa membedakan atas manusia lain dan menjadi ciri khas suatu individu atas individu lainnya. Tentunya dalam konteks politik, perilaku dapat dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan diantara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya ini adalah definisi dari perilaku politik.⁶⁰

Menjelang pemilihan legeslatif tahun 2024 perilaku pemilih dalam pemilihan umum sangatlah penting karena apabila pelaksanaan pemilu berjalan sukses, tentunya perilaku pemilih juga ikut sukses juga. Perilaku politik dan partisipasi politik pemilih adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilihan umum yang dilakukan nanti tentunya secara bebas dan membuat pemilih lebih independen dalam menentukan pilihannya. Dalam hal ini yang sangat

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Susan Kampung Peuniti (9 Mei 2023)

⁶⁰ Surbakti, Ramlan. *Memaami Ilmu Politik*. PT. Grasindo. Jakarta. 1992. Hal 15.

berperah besar adalah tentang pendidikan politik yang telah di mengerti oleh pemilih untuk menentukan pilihannya.

Seperti yang di paparkan oleh narasumber dari Kawasan Kampung Blower Kecamatan Baiturahman:

“Pandangan saya perempuan yang bergabung untuk menjadi anggota legislatif itu tidak masalah karena kita perlu wanita, seorang wanita itu dia seorang pendidik anak-anaknya mungkin nanti ada saran-saran yang bagus di forum-forum. Laki-laki dia tidak tau bagaimana kita di rumah, mendidik anak bagaimana”⁶¹

Dapat di jelaskan bahwa kurangnya edukasi terhadap para calon pemilih untuk mengerti apa yang terbaik untuknya ketika mereka memilih kandidatnya menjadi pemimpin, seperti mana yang dapat di jelaskan pendidikan adalah proses pengubah sikap tingkah laku seseorang atau suatu kelompok orang dalam mendewasann manusia dengan upaya pengarahan dan pelatihan. Tentunya pendidikan berperan besar dalam upaya penyerapan dan kemampuan untuk seni komunikasi. Sedangkan pendidikan politik adalah aktifitas yang mempunyai tujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada suatu individu. Pendidikan politik tentunya mempunya tujuannya yaitu membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.⁶²

Adapun pendapat lain mengapa perempuan tidak mendukung sesama perempuan peneliti mewawancarai Ibu Suhelmi yang berada di Kawasan Blower Kecamatan Baiturahman

“Terkadang perempuan itu mempunyai sifat-sifat tidak mau mengalah saya melihat tidak mau mendukung kawannya sendiri, semisalnya di kampung ini ada yang naik maunya mendukung orang kampung sendiri,

⁶¹ Hasil wawancara ibu suhelmi (10 Mei 2023)

⁶² Achmad Soeharto “*Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan*”

tapi ini tidak malah mendukung orang luar itu kebetulan sudah lama menjadi anggota dewan kan banyak uang dia. Maunya kampung sendiri dulu yang di pilih untuk naik, malah kebalikkannya pada saat di tanya ternyata calon dari kampung saya kurang bergaul dan kurang dikenal.”⁶³

Dapat di jelaskan bahwa menurut peneliti ini di pengaruh oleh yang namanya budaya politik yang mana definisi dari budaya sendiri adalah cara hidup dari sebuah masyarakat. Oleh kalangan sosiolog dan antropolog secara tegas menekankan bahwa kebudayaan sebagai pewaris watak yang berlangsung dari satu genderasi ke genderasi yang lainya atau berikutnya. Oleh ilmuwan politik dapat menempatkan dari pengertian budaya pada makna sempit yang merujuk pada orientasi psikologis masyarakat ata objek-objek politik seperti partai, pemerintahan, konstitusi, yang diekspresikan melalui keyakinan, simbol serta nilai-nilai dari simbol tersebutlah yang membentuk sikap dan pandangan suatu proses politik yang telah berlangsung.⁶⁴

Keterwakilan perempuan dalam politik didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berisi mandate kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama kepada lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini telah jelas bahwa perempuan bisa ikut serta dalam konteks politik yang telah dibuka tanpa harus mempermasalahkan unser gender.⁶⁵

⁶³ Hasil Wawancara Ibu Suhelmi (10 Mei 2023)

⁶⁴ Tedi Erviantono, jurnal dosen Ilmu Politik, Universitas Udayana “*Budaya Politik, Uang, dan Pilkada*”, Vol. 3, Nomor 2, September 2017.

⁶⁵ Ramlan Darmansyah, Ade Sartika. *Journal Civics and Social Studies “Representansi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024) Vol 5, No 1 (2021) hlm. 1.*

Adapun pandangan dari salah satu narasumber yang bekerja sebagai wartawan di salah satu stasiun swasta yang bernama Tia Andalusia menurut pendapat beliau, sebagai berikut:

“Dari pandangan saya perempuan yang bergabung menjadi anggota legislatif adalah perempuan yang berani, apalagi dalam pemerintah sendiri telah memberikan peluang sebanyak 30% tapi ternyata untuk saat ini hampir belum tercapai.”⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas adalah beliau memiliki pandangan bahwa perempuan yang bergabung ke ranah legislatif adalah perempuan yang berani untuk menyuarakan hak-hak perempuan di parlemen, mengenai pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif namun masih saja kuota tersebut belum terpenuhi karena ada beberapa sebab yang membuat perempuan sedikit susah untuk bergabung ke dunia politik karena sebgai masyarakat masih terpengaruhi oleh budaya patriaki.

4.2.2. Memilih karena Pendidikan dan Pengalaman

Para pemilih perempuan dalam memberikan pilihannya dalam politik tentunya mempertimbangkan latar belakang dari berbagai latar belakang mereka melihat dari partai, visi & misi, dan hal yang paling penting seberapa banyak pengalaman calon legeslatif perempuan tersebut dalam berpengalamannya dan memiliki jiwa kepemimpinan adapun tidak selamanya bahwa pemilih perempuan dalam menentukan pilihannya karena di pengaruhi oleh isu politik. Menurut March

⁶⁶ Hasil wawancara Tia Andalusia (20 Febuari 2023)

J Hetherington seperti dikutip Asfar dalam Iranto bahwa penilaian terhadap isu dan kandidat bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, namun sering dipengaruhi oleh informasi yang diterima pemilih melalui media massa yang diikutinya.⁶⁷

Seperti paparan dari Ibu Elly yang tinggal di Kawasan Bandar Baru, kecamatan kuta alam yang memaparkan bahwa:

“Perempuan jelas harus memiliki pengalaman karena kalau tidak bagaimana dia akan mengerti jabatan-jabatan apa saja yang mereka duduki nantinya”.⁶⁸

Dari tanggapan di atas bahwa pemilih perempuan juga melihat bagaimana pengalamannya para calon anggota legeslatif yang akan mereka pilih. Hal ini masuk kedalam pilihan rasional dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum pada 2019 tentunya ada yang memilih karena dari segi pengalaman dan keberhasilan caleg perempuan juga dilihat dari status pendidikan dan kualitas calon legeslatif tersebut. Semua itu para pemilih berharap agar perempuan dapat maju dalam memimpin.

Ketika peneliti ingin mencari tahu bagaimana pandangan perempuan dalam menilai pengalaman kandidatnya ada juga yang menjawab untuk tidak masalah perempuan tersebut memiliki pengalaman, hal ini peneliti mendapatkan dari Ibu Rina yang beralamat di Bandar Baru yang mengatakan bahwa:

“Tidak masalah perempuan untuk tidak memiliki pengalaman, kasih saja kesempatan kepada mereka yang ingin bergabung”.⁶⁹

⁶⁷ Asraf, Muhammad. (2006). *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka

⁶⁸ Hasil wawancara Ibu Elly (7 Mei 2023)

⁶⁹ Hasil wawancara Rina (23 Febuari 2023)

Dapat di simpulkan bahwa masih ada sebagian perempuan yang tidak masalah mengenai pengalaman apa saja yang telah kandidat tersebut dapat karena bagi mereka (pemilih) bukan pengalamannya di lihat namun bagaimana kinerja orang-orang yang terpilih nanti pada pemilu 2024.

Selanjutnya wawancara oleh Ibu Sulhemi yang menentang keras bahwa perempuan itu tidak boleh mencoba-coba saja untuk mendapatkan pengalaman ketika nanti menjadi anggota legislatif

“Menurut saya perempuan yang ingin bergabung keranah legislatif tidak boleh asal mencalonkan diri ditakutkan nanti bisa saja asal-asal dalam berpendapat, tapi kalau perempuan yang ingin bergabung ke ranah legislatif yang berpendidikan, paham politik dan berwawasan luas. Lalu dia turun ke politik itu jauh lebih bagus”⁷⁰

Dapat dijelaskan bahwa ini menjawab salah satu pandangan dari Gifford mengenai Persepsi dalam teorinya dengan *Personal Effect* dan menjawab dari hasil wawancara bahwa pengalaman dan pendidikan itu sangat perlu karena mempengaruhi pandangan para pemilih perempuan ketika mereka melihat latar belakang si calon anggota legislatif perempuan yang mencalonkan diri.

Pendidikan adalah suatu kewajiban dan keharusan, menurut Sreenivasulu menjelaskan bahwa pendidikan suatu hal yang sangat penting untuk membangun pengetahuan dan keterampilan intelektual untuk seluruh manusia.⁷¹ Tentunya pendidikan itu bukanlah suatu yang eksklusif yang mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakannya, namun lebih dari itu siapapun harus mendapatkan pendidikan yang layak tak terkecuali untuk perempuan.

⁷⁰ Hasil Wawancara Ibu Suhelmi (10 Mei 2023)

⁷¹ Screenivasulu, Sri. 2013. *Role and Impotance Education for effective Growth of Indian Economy: An Overview*. IOSR Journal of Humanities and Social Science 7 (5)

Begitu pentingnya perempuan merasakan pendidikan yang tinggi karena pendidikan adalah suatu jalan yang akan membawa perempuan untuk melewati besarnya pengaruh globalisasi, namun ada hal yang patut disayangi karena sebagian perempuan belum menyadari apa artinya pentingnya pendidikan, padahal pendidikan juga merupakan sebuah investasi agar membenrtuk sumber daya manusia yang tentunya berkualitas.⁷²

4.2.3. Perempuan Saling Mendukung Perempuan

Sebagian orang masih mempunyai pendapat perempuan lebih baik tidak disarankan untuk menjadi pemimpin, namun ada beberapa yang setuju untuk perempuan yang memimpin. Pada dasarnya seluruh orang bisa menjadi pemmpin, kepemimpinan adalah perilaku yang dapat mempengaruhi orang lain buat menggapai sesuatu tujuan dengan visi misi yang kuat. Di era modern untuk saat ini, banyak keterampilan-keterampilan yang telah berkembang dan yang di butuhkan oleh dunia kerja, sehingga dampaknya adalah jenis kelamin tidak lagi menjadi faktor penentuan keberhasilan. Ini dapat di lihat dari penampakan-penampkan pekerjaan yang dahulunya didominasi oleh kaum laki-laki, kini juga telah biasa di lakukan oleh perempuan, tentunya ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan kini memiliki keterampilan yang setara.⁷³

Gaya kepemimpinan seorang wanita tentunya berbeda dengan laki-laki karena semua itu di pengaruhi oleh sifat, akan tetapi untuk menjadi seorang

⁷² Balatchandirane, G. 2007. *Gender Discrimination in Education and Economic development: A Study of Asia. Japan: Institute of Developing Economies.*

⁷³ Majalah Female. (2023). 5 Ciri Wanita Pemimpin Terhebat diakses dari <http://www.kamarwanita.com/5-ciriwanita-pemimpin-terhebat-pada-17-Juni-2023>.

pemimpin yang efisien tentunya berhubungan dengan tujuan yang wajib untuk tercapai tidak hanya cuman watak perempuan ataupun ciri yang menempel pada dirinya, melainkan harus banyak aspek lain yang turut untuk mempengaruhinya.⁷⁴

Seperti paparan yang peneliti dapatkan di lapangan yang berasal dari salah satu masyarakat yang pastinya perempuan yang tinggal di sekitar Kampung Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam beliau bernama Ibu Intan yang berprofesi sebagai pedagang gorengan dan berikut paparan beliau:

“Kalau saya pro aktif dengan perempuan karena memangkan yang dibutuhkan memang seorang perempuan jadi kita sebagai perempuan untuk mengutarakan aspirasi kitakan jauh lebih gampang untuk memberikan aspirasinya karena lebih dekat menurut naluri kalau antar perempuan, sedangkan kalau dengan laki-laki bawaanya segan.”⁷⁵

Dapat di jelaskan bahwa perempuan lebih nyaman mengeluarkan keluh kesahnya dengan sesama perempuan. Pengelibatan perempuan sebagai pengalambihan kebijakan terkhususnya dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait isu-isu perempuan dan anak ataupun lingkungan sosial yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.⁷⁶ Tentunya perempuan memiliki pandangan secara luas mengenai permasalahan tersebut dan memiliki perbedaan cara pandangannya dan pengalaman dibandingkan laki-laki, juga di perlukan respresentasi perempuan untuk memprioritaskan isu-isu perempuan yang mampu melahirkan kebijakan sensitif gender. Gender menurut Lawless & Jennifer L.,

⁷⁴ Soebardhy, “*Kapita Selektta Metodologi Penelitian*”.

⁷⁵ Hasil wawancara Ibu Intan (5 Mei 2024)

⁷⁶ Murdiono, M. “*Perempuan Dalam Parlemen : Studi Analis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legeslatif 2009 Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

mereka meknai sebagai konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan etnis.⁷⁷

Bagi perempuan politik itu memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut kesetaraan dan keadilan supaya mendapatkan perlakuan yang sama dalam politik, hukum, masyarakat dan negara. Gender di dalam bidang politik menilai bahwa peran laki-laki dan perempuan di politik harusnya sama dan mendapatkan tempat yang sama dengan tempat laki-laki yang biasa laki-laki tempati.⁷⁸

Seperti pendapat dari Ibu Sri yang peneliti dapatkan di lapangan yang berada di Kawasan Kampung Blower Kecamatan Baiturahman

“Saya ini sangat mengharapkan perempuan untuk maju sebagai penentu kebijakan, tentunya harus masuk ke DPR dan dari situ akan lahirnya kebijakan-kebijakan tentang perempuan. Intinya adalah peraturan yang tidak jauh menyangkut tentang perempuan dan nanti kalau ada perempuan di DPR perempuannya banyak artinya bisa meloby pasal-pasal yang dibutuhkan oleh perempuan.”⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa lebih baik kebijakan perempuan di buat oleh sesama perempuan dan juga masih ada perempuan yang mendukung sesama perempuan untuk secara umum perempuan dalam berpartisipasi tidak hanya terpaku kepada politik saja, namun ikut berpartisipasi ke dalam seluruh aspek kehidupan karena perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk ikut dan berpartisipasi aktif terlebih lagi dalam politik tentunya ini sangat berpengaruh ke sebuah kebijakan.⁸⁰

⁷⁷ Lawless, & Jennifer L. “Sexism and Gender Bias in Election 2008: a more complex path for women in politics. *Politics Gend.*, 5 (1), 70-80.

⁷⁸ Tandang Assegaf, Nurcahaya. 2004. *Kembalikan Hak Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka

⁷⁹ Hasil Wawancara Ibu Sri (10 Mei 2023)

⁸⁰ Fuad, Z. M., 2015, “Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah” (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21 (1), h. 23.

Adapun pendapat yang peneliti dapatkan dari lapangan yaitu pengaruh dari wawasan yang luas, hubungan sosial yang bagus juga mempengaruhi pemilih untuk memilih, seperti pendapat dari Ibu Umi Kalsum:

“Kalau ada perempuan yang bener-bener pandai memiliki wawasan yang luas, pandai ngomong kalau bisa naik lebih baik yang seperti itu. Kalau kita lihat lebih pintar perempuan tapi ini kembali ke pilihan masing-masing lagi tapi menurut saya seperti itu.”⁸¹

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan seperti pendidikan politik akan mewujudkan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Pendidikan politik untuk kaum perempuan tentunya harus mengarah tepat pada sasaran kemampuannya supaya memiliki kekuatan penyadaran pentingnya pembebasan perempuan terhadap marginalisasi politik sehingga memiliki jati diri yang kuat ke dalam kiprahnya untuk berpolitik. Untuk menstabilkan kualitas perempuan ada tiga hal yang harus di perhatikan agar bisa fokus terhadap kepekaan sosial dan politiknya, yaitu: *pertama*, melakukan pengembangan terhadap kecerdasan spiritual karena Tuhan menciptakan manusia ke dalam keadaan yang sama dan memiliki hak yang sama, *Kedua* mengembangkan kecerdasan emosi yang mana kecerdasan ini memang kelebihan untuk dimiliki oleh kaum perempuan, oleh karena itu perempuan lebih baik dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anak ketimbang lelaki. tentunya kecerdasan emosional harus di imbangi dengan kecerdasan rasionalitas, supaya perempuan bisa mengimbangi kemampuan rasionalitasnya ke daalam kehidupan sosial maupun

⁸¹ Wawancara Ibu Umi Kalsum (7 Mei 2023)

dunia politik, dan *Ketiga* mengembangkan kecerdasan berpikir (intelengensi). Tentunya ini didukung oleh pendidikan yang baik, perempuan akan bisa menentukan terhadap sikap maupun pilihannya, mana yang baik untuk kehidupannya. Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan untuk perempuan dalam menggunakan hak pilihnya kedepan.⁸²

4.3. Harapan Para Pemilih Perempuan Terhadap Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2024

Perempuan yang mau bergabung keranah politik tentunya harus mendobrak budaya dan pandangan masyarakat karena beberapa dari pemilih perempuan masih saja menganggap bahwa perempuan belum layak untuk menjadi pemimpin. Dalam wawancara dari beberapa hasil peneliti dari mereka para pemilih perempuan, tentunya memiliki harapan terhadap perempuan yang nanti terpilih pada pemilu 2024 DPR Kota Banda Aceh.

4.3.1. Memberi Jaminan Terhadap Perempuan

Banyaknya kekerasan yang dialami oleh perempuan dan sudah sampai kepada tahap yang sangat mengkhawatirkan ironisnya bahwa data pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan yang berbanding terbalik dengan jumlah pemberian perlindungan dan penegakkan hukum terhadap kasus kekerasan yang menjadikan kaum perempuan sebagai korban telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik telah mendapat 5.444 aduan terkait kasus

⁸² Kartini Eriani. "Pendidikan Politik Bagi Perempuan". <http://www.Waspada.co.id>.

kekerasan perempuan yang sudah terjadi di seluruh Indonesia, namun hanya ada 1.177 kasus saja yang ditegakkan hukum terhadapnya.⁸³

Sedangkan menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (DP3A) pada tahun 2022 kekerasan terhadap perempuan untuk kasus kdrt ada sebanyak 311 kasus atau sebesar 40,29%, kekerasan psikis sebanyak 198 kasus atau sebesar 26,51% dan pada kekerasan fisik ada sebanyak 129 kasus atau sebesar 17,27% kekerasan fisik.⁸⁴

Seperti harapan dari Ibu Nasriah yang berasal dari kampung Blower, Kecamatan Baiturahman.

“Khusus untuk caleg perempuan mereka harus terampil dan berani untuk mengeluarkan pendapat-pendapat yang bagus tentunya untuk membangun sesama perempuan. Apalagi di zaman sekarang kita bisa melihat kasus-kasus tentang kekerasan perempuan yang telah terlalu banyak. Ketika nanti, perempuan yang sudah maju menjadi dewan dia harus bisa yang pertama dari saya adalah mereka harus bisa mengayomi sesama perempuan, kedua dia harus bisa melindungi dan ketiga memperhatikan perekonomian.”⁸⁵

Dapat di simpulkan bahwa dari hasil wawancara diatas adalah perempuan yang telah terpilih nanti untuk menjadi anggota DPRK 2024 harus berani mengeluarkan pendapat yang berpihak terhadap perempuan dan kebijakan-kebijakan yang tentunya untuk menjamin keselamatan dan membuat rasa aman kepada para perempuan-perempuan agar bisa meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan.

⁸³ Imam Sukandi, Mila Rahayu Ningsih Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, vol 16, No 1, Tahun 2021.

⁸⁴ <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kemen-pppa-dp3a-aceh-cegah-dan-tangani-kekerasan-terhadap-perempuan>. (Diakses pada 8 September 2023)

⁸⁵ Hasil wawancara Ibu Nasriah (10 Mei 2023)

Hasil temuan yang peneliti dapatkan dari harapan masyarakat perempuan selanjutnya adalah pemilih mengharapkan ketika calon anggota legislatif perempuan terpilih nantinya harus membuat kebijakan yang terkait dengan perempuan, berikut paparnya dari Ibu Mariani yang berada di wilayah kampung Neusu, kecamatan Baiturahman:

“Ketika nanti perempuan yang terpilih pada pemilu 2024 harapan saya tolong dibuatkan peraturan keringanan dalam cuti melahirkan dan menyusui supaya anak-anak nanti bisa mendapatkan asi eksklusif dari ibunya dan juga kami bisa merawat anak-anak kami tanpa memikirkan pekerjaan.”⁸⁶

Dapat disimpulkan bahwa para perempuan yang telah menjadi seorang ibu ingin memberikan kasih sayang yang cukup kepada bayi-bayi mereka di rumah setelah melahirkan dan ingin diberikan waktu yang cukup ketika bekerja yang memiliki bayi dirumah.

Adapun pendapat yang peneliti dapatkan dilapangan di kawasan Kampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam mengenai jam operasional untuk perempuan agar meminimalisir angka kejahatan bagi perempuan yang masih di luar rumah yang tidak memiliki kepentingan, berikut paparan dari Ibu Nong atau yang akrab di panggil Kak Nong :

“Saya Ingin sekali Kota Banda Aceh dipimpin oleh perempuan yang tegas tentang keamanan untuk jam malam seperti jaman dahulu dipimpin oleh wali kota Iliza, anak perempuan tidak boleh keluar malam dan pada saat itu juga pintu masuk Ulele Lheue untuk meminimalisir tingkat kejahatan, saya merasa aman kalau para anak perempuan itu ada batas waktu untuk diluar dengan hal-hal yang tidak perlu.”⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa Ibu-ibu sangat khawatir apabila tidak diterapkannya jam malam khususnya untuk anak perempuan untuk yang tidak

⁸⁶ Hasil Wawancara Ibu Mariani (4 Maret 2023)

⁸⁷ Hasil Wawancara Ibu Nong (6 Mei 2023)

memiliki kepentingan keluar di jam yang sudah malam karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, harapan ini mungkin akan banyak sekali mendapatkan pengertikan oleh beberapa kalangan jika ini diterapkan ke publik nantinya.

4.3.2. Pengenalan latar belakang calon anggota legeslatif

Begitu pentingnya pengenalan diri kepada masyarakat agar mereka mengenal siapa saja yang akan menjadi calon anggota legeslatif yang berasal dari tempat tinggal mereka atau orang-orang menyebutkannya sebagai kampanye. Kampanye sendiri memiliki definisi yaitu penyampaian pesan-pesan politik dalam berbagai bentuk, mulai dari poster, diskusi, iklan dll. Kesuksesan pada setiap kampanye tentu selalu hadir para perancang pesan yang sensitif dan kreatif.⁸⁸

Seperti paparan yang peneliti dapatkan di lapangan dari Ibu Intan yang berprofesi sebagai pedagang gorengan di Kawasan Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam

“Harapannya untuk para calon anggota yang terpilih semoga para aspirasi kami masyarakat bisa tercapai dan cepat di proses untuk di kerjakan yang paling penting adalah pengenalan diri atau latar belakang untuk mengenali diri ke masyarakat”.⁸⁹

Dapat di simpulkan bahwa para anggota perempuan yang terpilih nantinya agar dapat secepatnya menjalankan para aspirasi masyarakat dan hal yang paling penting adalah pengenalan diri kepada masyarakat dan visi misi juga penting untuk di perkenalkan.

⁸⁸ Regores & Snyder (2002). Manajemen Kampanye. Venus “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

⁸⁹ Hasil Wawancara Ibu Intan (6 Mei 2023)

Adapun pendapat dari Ibu Suhelmi yang tinggal di Kampung Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, berikut paparan dari Ibu Suhelmi:

“Saya sangat berharap terharap para calon anggota legislatif dari wilayah saya, terutama Kampung Sukaramai, sebelum ingin mencalonkan diri diharapkan sebelumnya bergabung bersama Ibu-ibu pengajian supaya kami memiliki ikatan sosial secara dekat. Jangan dimana mau mencalonkan diri baru bergabung ke acara Ibu-ibu mungkin itu akan sulit dipilih oleh kami karena dari awal belum memiliki hubungan yang terlalu dekat.”⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa keinginan dari salah satu pemilih perempuan yang berasal dari Kampung Sukaramai mengharapkan kepada para caleg perempuan untuk bergabung terlebih dahulu jika ada acara yang diadakan di kampung-kampung karena untuk membangun hubungan sosial kepada masyarakat itu memakan waktu yang tidak sedikit supaya mereka para pemilih percaya terhadap calon anggota legislatif yang ingin duduk ke legislatif.

4.3.3. Bertanggung Jawab Terhadap Kepemimpinan untuk Masyarakat

Rasa tanggung jawab harus dimiliki oleh setiap para pemimpin baik itu pemimpin perempuan maupun pemimpin laki-laki, rasa tanggung jawab ini sangat di harapkan oleh masyarakat karena dari ini akan lahirnya perubahan-perubahan baru untuk masyarakat dan bisa jadi dengan adanya rasa tanggung jawab ini semakin meminimalisir angka korupsi di Indonesia.

Seperti pendapat dari salah satu narasumber bernama Ibu Novita yang berada di Kawasan Beurawe, kecamatan Kuta Alam

“Perempuan yang terpilih harus memiliki rasa tanggung jawab jika dia ketika berkampanye ketika berjanji harus bertanggung jawab dengan janjinya dan dengan apa visi misinya harus di sesuaikan intinya harus punya rasa bertanggung jawab ketika terpilih nanti.”⁹¹

⁹⁰ Hasil Wawancara Ibu Suhelmi (10 Mei 2023)

⁹¹ Hasil Wawancara Ibu Novita (7 Mei 2023)

Dapat disimpulkan para pemimpin khususnya perempuan yang jika terpilih pada pemilu 2024 untuk DPRK nanti ketika membuat janji ketika berkampanye harus terlaksanakan karena disilanih letak kepercayaan masyarakat kepada para anggota yang telah terpilih nanti. Saat ini peran perempuan dalam politik semakin kuat, ini dapat terlihat makin banyaknya kepala daerah, anggota DPR, bahkan menteri di duduki oleh perempuan. Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan kalau para anggota legeslatif perempuan yang terpilih semakin banyak yang menepati janjinya.

Adapun penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan adalah ketika anggota legislatif perempuan terpilih jangan lupa kepada para pedagang kecil apalagi perempuan yang janda dan memiliki anak, seperti paparan dari Ibu Intan sebagai pedagang gorengan di wilayah Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam:

“Kebetulan saya pedangan kecil jualan gorengan semoga orang-orang yang seperti kami ini dapat diperhatikan lagi apalagi mungkin di luar sana ada yang suaminya telah meninggal dan meninggalkan anak.”⁹²

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecil ingin diperhatikan lagi oleh pemerintah terutama para janda yang telah ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal.

4.4. Analisis Peneliti

Indonesia telah memberikan ruang kepada perempuan agar memiliki kesempatan untuk bergabung menjadi calon anggota legeslatif dan memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki. Di dalam masyarakat yang demokratis dan

⁹² Hasil Wawancara Ibu Intan (5 Mei 2023)

di dalam suatu hubungan yang demokratis ada hak-hak sipil dan kebebasan yang dihormati dan dijunjung tinggi.⁹³

Berikut analisis peneliti untuk para calon anggota legeslatif perempuan di pemilu 2024 bagaimana yang seharusnya para caleg perempuan lakukan agar mudah terpilih nantinya ataupun mudah dikenal oleh para masyarakat:

a. Melakukan kedekatan

Masyarakat melihat siapa yang paling dekat, meskipun tidak memahami rakyat, namun setidaknya terlihat peduli dengan rakyat dengan keluar masuk kampung calon anggota legeslatif perempuan bisa bercerita, bertanya dan sapa antar sesama perempuan agar obrolannya nyambung apa yang diharapkan oleh para masyarakat khusus perempuan, hal yang seperti inilah yang akan membuat lolos dalam pemilihan dan ide itu, populer dengan istilah “*blusukan*”.

Suatu ketokohan memang harus di bangun atau dengan nama lain membangun citra dalam politik dan itu tidak hadir dengan begitu saja. Bahkan, Aristoteles pada 2000 tahun yang lalu telah menyampaikan bahwa ketokohan, performa personal sangat begitu penting untuk menjujung tinggi wibawa public. Dan untuk itu, berkumpul atau berbaur bersama masyarakat, harus pandai berdiskusi dan retorik untuk menjadi ramuan pembangunan karakter atau *etos*.⁹⁴

b. Memiliki Modal Ekonomi (*Economic Capital*)

⁹³ Rafael Raga Maran, “*Pengantar Sosiologi Politik*”, (Jakarta : Rineka Cipta 2014), h. 204.

⁹⁴ Dr. Dedi Kurnia Syah Putra “*Komunikasi CSR Politik Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*”, (Jakarta: Kencana:2015), hal. 14-15

Modal ini menunjukkan kepada dukungan dana atau finansial berupa uang baik yang berasal dari caleg sendiri ataupun partai politik atau pihak-pihak lainnya. Pada sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak tentunya membuat setiap caleg harus menyiapkan ekonomi yang sangat besar dengan bertujuan untuk memenuhi ongkos politik yang dibutuhkan selama proses kampanye. Misalnya, keperluan kuota internet, membuat spanduk kedua ini sebagai sarana peraga kampanye, membayar relawan untuk dapat mempengaruhi masyarakat supaya mau memilih. Calon anggota legislatif juga memberikan bantuan secara materi kepada masyarakat dan pada umumnya ini adalah modal ekonomi yang berasal dari dana pribadi calon anggota legislatif tersebut dan mayoritas modal ekonomi tersebut harus menjadi modal pendukung supaya masyarakat benar-benar memilihnya, modal ekonomi merupakan hal yang paling penting karena *cost* atau biaya politik itu sangatlah dibutuhkan. Siapapun yang akan terjun keranah politik tentunya harus memiliki modal ekonomi. Selain itu modal ekonomi juga digunakan untuk memberikan insentif kepada tim kampanye dan saksi, sebagaimana pula dilakukan sebagian besar calon anggota legislatif lainnya baik di Kota Banda Aceh maupun di seluruh Indonesia

c. Mendapatkan Izin dari Keluarga dan pasangan

Jaringan keluarga merupakan faktor yang sangat begitu penting dalam membangun suatu dukungan sosial bagi caleg perempuan. Tentunya hal ini didasarkan pada alasan bahwa ketika perempuan telah memutuskan untuk bergabung keranah politik, ia harus siap menerima segala risiko termasuk risiko untuk menghabiskan urusan politik. Ketika caleg perempuan tidak mendapatka

dukungan dari keluarga ataupun pasangannya, maka ia akan merasa kesulitan untuk membagi waktu antara keluarga, pasangan, dan juga pekerjaannya. Dukungan jaringan keluarga ini sangat memberikan dampak yang beruntung sekali bagi calon anggota legeslatif, terutama bagi para caleg-caleg yang mengalami kelemahan dalam modal ekonomi.⁹⁵

d. Modal Dukungan Partai

Pada pelaksanaan pemilu legislatif, calon legislatif perempuan tentunya memerlukan dukungan dari partai politik untuk dapat dicalonkan. Dengan adanya dukungan dari partai politik, ini merupakan modal politik yang kuat agar menang dalam pemilihan umum.⁹⁶

Menurut Field modal politik adalah pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan atau memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik yang bersangkutan.⁹⁷

⁹⁵ Dessy Ramadhani, Dian Eka Rahmawati, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “*Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia : Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*” . Vol. 10, No. 1, hal. 48-55

⁹⁶ Giskeka Canna Indira S, Chusnul Maryah jurnal *Sosial and Government* “*Analisis Modal Politik, Sosial, dan Ekonomi terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019*”, Vol , No 2 juni 2021, hlm.61

⁹⁷ Field, J., 2003, *Social Capital*, London: Routledge

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi perempuan terhadap calon legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagian perempuan ternyata masih ada menaruh harapan kepada sesama perempuan di balik beberapa kelompok perempuan yang kurang mendukung keterlibatan perempuan untuk menjabat sebagai anggota legeslatif.
2. Adapun pandangan dari sebageaian perempuan mengapa untuk tidak memilih perempuan karena faktor si calon tidak memiliki hubungan sosial, maka dari itu hubungan sosial lebih baik dibangun sebelum sebelum pemilu karena hubungan sosial ini membutuhkan waktu yang tidak singkat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti mempunyai saran untuk kedua belah pihak baik untuk para pemilih, maupun untuk perempuan yang terpilih pada periode 2024 mendatang:

1. Kepada para masyarakat perempuan semoga kedepannya memberikan dukungan sesama perempuan kepada mereka yang ingin bergabung ke

ranah legislatif supaya terjadinya istilah Perempuan mendukung perempuan.

2. Saran yang paling penting dalam penelitian ini adalah untuk para Calon Anggota Legislatif Perempuan adalah bangunlah hubungan sosial kepada masyarakat dari sebelum Pemilihan Umum agar masyarakat tambah yakin dan percaya bahwa calon anggota perempuan tersebut mampu untuk menjadi anggota legislatif dan lebih gampang untuk mengumpulkan massa ketika pemilihan umum nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Anugrah. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta, Pancuran Alam., 2009.
- Aklima. *Menyoal Kualitas Caleg Perempuan Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aceh*. vol. 7, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2022.
- Ardiansa, Dirga. *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*. vol. 2, *jurnal politik*.
- Assegaf, Nurcahya Tandang. *Kembalikan Hak Perempuan*. Yogyakarta, Pustaka, 2004.
- Bawono, Muhammad. *Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta, Kencana, 2006.
- Dian Eka Rahmawati, Dessy Ramadhani. *Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia : Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. vol. 10, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu*.
- Chusnul Mariyah, Giscka Canna Indira S. *Analisis Modal Politik, Sosial, dan Ekonomi terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019*. vol. 2, Jakarta, *jurnal Social and Government*, 2021.

- Ramdhani, Dessy, dkk. *Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. vol. 10, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Adi, Jusri, dkk. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba*. vol. 8, Jurnal Administrasi Publik, 2022.
- Firman, Ruddy, dkk. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang*. vol. 4, Jurnal Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022.
- Effendi Hasan, Satria Muchayar. *Hak Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Perannya Dalam Alat Kelengkapan Dewan*. Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah.
- Erviantono, Tedi. *Budaya Politik, Uang, dan Pilkada*. vol. 3, jurnal dosen Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2017.
- Field. *Social Capital*. London, Routledge, 2003.
- Fuad, Z. M. *Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah*. Jawa Tengah), Jurnal Ketahanan Nasional, 2015.
- Gifford, Robert. *Principles and Practice*. Environmental Psychology, 2014.
- Hamzah Halim, Aziza Aulya Andi Pangeran Moenta. *Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmation Action dalam Sistem Kepartaian*. vol. 30, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Hamid, Hasriani. *Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action*. vol. 3, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hamid, 2019.
- Hendri Kurniawan., Jusri Adi Fitriani Sari Handayani Razak. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Administrasi Publik.
- HSB, Siti Fatimah. *Persepsi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Periode 2014-2019 Di Kabupaten Mandailing Natal*. Padangsidempuan, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, 2021.
- Husna, Cut Asmaul. *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pembangunan Aceh Pasca Konflik*. 2016.
- Ibrahim, Muh. Ikramullah Husaini. *Kekalahan Calon Legislatif Perempuan dari Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, 2017.
- Irwanto. *Psikologi Komunikasi*. Bandung, PT Rosdakarya, 1998.
- Jalaluddin, Rahmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung, PT Rosdakarya., 1998.
- James, Gibson. *Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta, Erlangga, 1986.
- Jennifer L, Lawless. *Sexism and Gender Bias in Election 2008: a more complex path for women in politics*. *Politics Gend*.
- J, Squires. *Gender In Political Theory*. Cambridge, Polity Press, 1999.
- Kartini, Kartono. *Pemimpin dan /kepemimpinan*. Jawa Barat, Raja Grafindo Persada, 2009.

- Kiftiyah, Anifatul. *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. vol. 14, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 2019.
- Kurnia Syah Putra, Dr. Dedi. *Komunikasi CSR Politik Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*. Jakarta, Kencana, 2015.
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, Rineka Cipta, 2014.
- Mila Rahayu Ningsih, Imam Sukandi. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. vol. 16, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 2021.
- Muhammad, Asraf. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya, Pustaka Eureka, 2006.
- Munifah, Rafifah. *Pengaruh Interpretasi Terhadap Preferensi Keterpilihan Caleg Perempuan Di DPRK Kota Sabang*. Skripsi Mahasiswa Ilmu Politik.
- Murdiono, M. *Perempuan Dalam Parlemen : Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- M, Thoha. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Novianti, Ida. *Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Jurnal studi & Anak.
- PS, Asngari. *Persepsi Direktur Penyuluhan Pertanian Tingkat Karesidenan dan Kepala Penyuluh Pertanian Terhadap Peranan dan Fungsi Lembaga Penyuluh Pertanian di Negara Bagian Texas Amerika Serikat*. vol. 9, Bogor, Media Peternakan, 1984.

- Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Grasindo, 1992.
- Salmaniah, Nina Siti. *Metode dan Teknik Wawancara*. Karya Ilmiah.
- Soeharto, Achmad. *Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan*. vol. 3, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Snyder, Regores. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Manajemen Kampanye Venus.
- S.P., Robbins. *Perilaku Organisasi (Jilid I). Edisi Alih Organisasi Bahasa*. Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003.
- Suhra, Sarifa. "Potret Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia." vol. XI, 2018.
- Ubaidullah, Razimi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP*. Sosialisasi Politik Partai Nanggroe Aceh Kota Banda Aceh Untuk Menekan Angka Golput 2019, 2019.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta, Andi Offset, 2004.
- Yozzevi, Vernanda Bella. *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2014-2019 di Provinsi Lampung*. Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.

DOKUMENTASI



(Fadlatun Rina, 23 Februari 2023)



(Ibu Mariani, 4 Maret 2023)



(Ibu Elly, 7 Mei 2023)



(Ibu July, 3 Mei 2023)



(Ibu Intan, 5 Mei 2023)



(Ibu Nong, 6 Mei 2023)



(Ibu Novita, 7 Mei 2023)



(Ibu Ita, 7 Mei 2023)



(Ibu Salwa, 9 Mei 2023)



(Ibu Suhelmi, 10 Mei 2023)



(Ibu Susan, 9 Mei 2023)



(Ibu Nasriah, 10 Mei 2023)





(Ibu Sri, 10 Mei 2023)

Pertanyaan Penelitian

1.	Bagaimana pandangan ibu terhadap perempuan-perempuan yang berkecimpung keranah legislatif?	Menurut saya baik kalau perempuan ada yang mau bergabung keranah legislatif, keuntungannya untuk kita perempuan ketika ada kebijakan-kebijakan tentang perempuan bisa cepat terlaksanakan nantinya
2.	Apa yang membuat ibu memilih perempuan pada pemilu 2019 ?	Karena visi misinya bagus
3.	Apa yang membuat ibu tidak memilih perempuan pada pemilu 2019?	Karena perempuan lebih baik di pimpin dari pada memimpin
4.	Menurut ibu pentingkah seorang calon legislatif perempuan untuk memiliki pengalaman terlebih dahulu supaya bisa untuk mencalonkan diri?	Iya, harus supaya bisa bekerja sesuai dengan pengalamannya karena pengalaman itu sangat penting
5.	Apa dampak yang telah ibu rasakan terhadap anggota legislatif perempuan yang telah terpilih pada pemilihan sebelumnya?	Tidak ada
6.	Di tempat ibu apakah ada budaya yang membentuk untuk lebih baik memilih A dari pada memilih B?	Di kampung kami tidak ada budaya yang seperti itu di tempat kami bebas mau memilih siapa

7.	Bagaimana masukan ibu terhadap para anggota legislatif perempuan yang terpilih nanti pada pemilihan umum 2024 nanti?	Harus tepat pada janji apa yang telah di janjikan.
----	--	--

